

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pendidikan

2.1.1.1 Pengertian Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor utama yang berpengaruh penting untuk perkembangan generasi muda sebagai penerus bangsa yang berkualitas sebab pendidikan sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, pendidikan dapat membantu manusia untuk lebih baik. Dalam upaya pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas peran pendidikan sangat besar karena menurut Syah (2010: 10), “Pendidikan adalah “sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan”. Dengan menempuh pendidikan seseorang akan lebih mengembangkan kemampuan yang dimilikinya pendidikan menjadi salah satu kebutuhan hidup yang prosesnya berlangsung seumur hidup untuk semua orang tanpa terkecuali bagi orang dewasa.

Menurut Sedarmayanti (2018: 32), mendefinisikan secara umum “Pendidikan adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan”. Selanjutnya Mangkunegara (2019: 44) “Pendidikan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek yang mempergunakan

prosedur sistematis dan terorganisir dimana pegawai non managerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis dalam tujuan terbatas”.

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa pendidikan yang dilalui oleh seseorang merupakan keseluruhan proses pendidikan yang diorganisasikan apapun isi, tingkatan, metodenya, baik formal atau tidak, yang melanjutkan maupun menggantikan pendidikan semula di sekolah, akademik dan universitas serta latihan kerja, yang membuat orang yang dianggap dewasa oleh masyarakat mengembangkan kemampuannya, memperkaya pengetahuannya, meningkatkan kualifikasi teknis ataupun profesionalnya.

2.1.1.2 Indikator Pendidikan

Menurut Idris dalam Bagia (2014) menyatakan indikator dari tingkat pendidikan yaitu

1. Pendidikan formal

Pendidikan ini diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya dengan jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi.

2. Pendidikan informal

Pendidikan non-formal dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan seseorang tertentu untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, latihan, dan bimbingan sehingga mampu bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan negara.

3. Pendidikan nonformal.

Pendidikan informal, jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.

Faktor yang mempengaruhi pendidikan menurut Hasbullah (2021: 63) adalah :

a. Ideologi

Semua manusia dilahirkan ke dunia mempunyai hak yang sama khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan dan peningkatan pengetahuan.

b. Sosial Ekonomi

Semakin tinggi tingkat sosial ekonomi memungkinkan seseorang mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

c. Sosial Budaya

Masih banyak orang tua yang kurang menyadari akan pentingnya pendidikan formal bagi anak-anaknya.

d. Perkembangan IPTEK

Perkembangan IPTEK menuntut untuk selalu memperbaharui pengetahuan dan keterampilan agar tidak kalah dengan negara maju.

e. Psikologi

Konseptual pendidikan merupakan alat untuk mengembangkan kepribadian individu agar lebih bernilai.

Fungsi pendidikan adalah sama dengan fungsi latihan yaitu memperlancar dalam melaksanakan tugas, kegiatan memperbaiki dan pengembangan tingkah laku, keterampilan dan pengetahuan pegawai yang bersangkutan.

2.1.2 Pelatihan Kerja

2.1.2.1 Pengertian Pelatihan Kerja

Pendidikan meningkatkan keahlian teoretis, konseptual, dan moral karyawan, sedangkan latihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis pelaksanaan pekerjaan karyawan. Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tanggal 13 September 1974 dalam Hasibuan (2020: 64), Pendidikan adalah segala usaha untuk membina kepribadian dan mengernbangkan kemampuan manusia Indonesia, jasmaniah dan rohaniyah, yang berlangsung seumur hidup, baik di dalam maupun di luar sekolah, dalam rangka pembangunan persatuan Indonesia dan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Latihan adalah bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku, dalam waktu yang relatif singkat.

Pendidikan adalah berhubungan dengan peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman atas lingkungan kita secara menyeluruh). *Training is the act of increasing the knowledge and skill of an employee for doing a particular job..*

Menurut Hasibuan (2020: 69), Latihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir, sehingga karyawan operasional belajar pengetahuan teknik pengerjaan dan keahlian

untuk tujuan tertentu). Drs. Jan Bella dama Mangkunegara (2019: 43) mengemukakan jika pelatihan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar bisa menjadi sumber daya yang berkualitas baik dari segi pengetahuan, keterampilan bekerja, tingkat profesionalisme yang tinggi dalam bekerja agar bisa meningkatkan kemampuan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dengan baik. “latihan dan pengembangan dapat didefinisikan sebagai usaha yang terencana dari organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai.”

Menurut Mathis dan Jackson dalam Yani (2017 : 83) jenis-jenis pelatihan dapat dirancang untuk memenuhi tujuan berbeda dan dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai cara, yang meliputi :

- a. Pelatihan yang dibutuhkan dan rutin : dibutuhkan untuk memenuhi berbagai syarat hukum yang diharuskan dan berlaku sebagai pelatihan untuk semua karyawan (orientasi karyawan baru).
- b. Pelatihan pekerjaan/teknis : memungkinkan para karyawan untuk melakukan pekerjaan, tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik.
- c. Pelatihan antar-pribadi dan pemecahan masalah : dimaksudkan untuk mengatasi masalah operasional dan antar pribadi serta meningkatkan hubungan dalam pekerjaan organisasional.
- d. Pelatihan perkembangan dan inovatif : menyediakan fokus jangka panjang untuk meningkatkan kapabilitas individual dan organisasional untuk masa depan.

2.1.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelatihan Kerja

Mondy (2018: 212) mengemukakan bahwa pelatihan dan pengembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Dukungan Manajemen Puncak, dukungan kepemimpinan dari atas sangat berguna agar program-program pelatihan dan pengembangan dapat berjalan dengan baik
2. Komitmen Para Spesialis dan Generalis, selain dukungan dari manajemen puncak, keterlibatan seluruh manajer baik spesialis maupun generalis sangat berpengaruh pada keberhasilan proses pelatihan dan pengembangan.
3. Kemajuan Teknologi, teknologi memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pelatihan dan pengembangan terutama penggunaan komputer dan internet yang secara dramatis mempengaruhi berjalannya fungsi-fungsi bisnis.
4. Kompleksitas Organisasi, struktur organisasi juga berpengaruh terhadap proses pelatihan dan pengembangan. Struktur organisasi yang lebih datar karena lebih sedikitnya level manajerial membuat tugas-tugas individu dan tim semakin diperluas dan diperkaya.
5. Gaya belajar, meskipun banyak hal yang belum diketahui mengenai proses belajar, beberapa generalisasi yang dinukil dari ilmu-ilmu keperilakuan telah mempengaruhi cara perusahaan-perusahaan melaksanakan pelatihan.
6. Fungsi-fungsi sumber daya manusia lainnya, pelaksanaan yang sukses dari fungsi-fungsi manajemen yang lain juga mempengaruhi pelatihan dan pengembangan. Sebagai contoh, jika upaya-upaya rekrutmen dan seleksi hanya menarik para karyawan berkualifikasi sedang, perusahaan akan membutuhkan

program-program pelatihan dan pengembangan yang ekstensif. Paket kompensasi perusahaan juga bias mempengaruhi upaya-upaya pelatihan dan pengembangan.

2.1.2.3 Indikator Pelatihan Kerja

Menurut Mangkunegara (2018: 44), program pelatihan yang efektif yang diberikan kepada pegawai dapat diukur melalui.

1. Tujuan dan sasaran pelatihan, yaitu apakah isi program pelatihan relevan dan sejalan dengan kebutuhan pelatihan, dan apakah pelatihan tersebut *up tu date*.
2. Para pelatih, yaitu apakah instruktur mempunyai sikap dan keterampilan penyampaian yang mendorong orang untuk belajar.
3. Materi latihan, yaitu berapa lama waktu pemberian materi pokok yang harus dipelajari dan seberapa cepat tempo penyampaian materi.
4. Metode pelatihan, apakah metode pelayihan yang diberikan sesuai untuk subjek itu dan apakah metode pelatihan tersebut sesuai dengan gaya belajar peserta pelatihan.
5. Peserta pelatihan, yaitu apakah peserta pelatihan memenuhi persyaratan yang ditentukan, apakah relevansi dengan jenis pelatihan dan apakah makanannya memuaskan.

2.1.3 Pemahaman Akuntansi Sektor Publik

2.1.3.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Menurut Arens, et al (2017:7) adalah: “Akuntansi adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran peristiwa ekonomi dengan cara yang logis dengan tujuan menyediakan informasi keuangan untuk pengambilan

keputusan”. Menurut buku *A Statement of Certified Public Accounting* (AICPA) dalam Syafri (2018:5) mendefinisikan akuntansi sebagai berikut: “Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya. Menurut *Accounting Principle Boards* (APB) Statement No.4 dalam Syafri (2018:5) mendefinisikan akuntansi sebagai berikut: “Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar memilih di antara beberapa alternatif”.

Akuntansi pemerintahan adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, (Bastian, 2017:3). Istilah sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam, hal ini merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (politik, ekonomi hukum dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Pengertian akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (2017 : 20) adalah sebagai berikut: “Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut”. Pengertian Akuntansi Sektor Publik menurut Bastian (2017 : 6) menyebutkan bahwa: “Mekanisme teknik dan analisa akuntansi

yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta”. Menurut Halim dan Kusufi (2014: 3) akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Dari pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa akuntabilitas sektor publik memiliki peranan sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan karena penyelenggaraan akuntabilitas sektor publik bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan berasal dari masyarakat.

2.1.3.2 Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik berkaitan dengan tiga hal, yaitu persediaan informasi, pengendalian manajemen dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik ini merupakan alat informasi bagi pemerintah maupun alat informasi bagi publik. Informasi akuntansi ini sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Menurut Mardiasmo (2019:14) tujuan akuntansi sektor publik adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan

kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (management control).

2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (*accountability*).

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintah dalam Poerwadarminta (2016: 14) tingkat pemahaman akuntansi yaitu

1. Tingkat pemahaman terhadap komponen laporan keuangan dan prinsip akuntansi. Tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumberdaya yang dipercayakan kepadanya.
2. Tingkat Pemahaman terhadap pengakuan unsur-unsur dalam laporan keuangan
Kualitas Laporan Keuangan Agar suatu laporan keuangan dapat memberi manfaat bagi para pemakainya maka laporan keuangan tersebut harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan. Kualitas laporan keuangan tersebut tercermin dari karakteristik kualitatif.

Dilihat dari tujuan di atas dapat dinyatakan bahwa tujuan akuntansi sektor publik adalah memberikan informasi yang diperlukan untuk melakukan suatu

tindakan atau keputusan secara efisien yang dikelola oleh organisasi yang dipercayakan serta pelaporan pertanggungjawaban kepada publik atas hasil operasi atau dana publik yang telah digunakan.

2.1.3.3 Indikator Akuntansi Sektor Publik

Menurut Bastian (2017:7) elemen akuntansi sektor publik adalah bagianbagian yang dibutuhkan dalam pengelolaan manajemen keuangan publik. Akuntansi sektor publik terdiri dari elemen-elemen sebagai berikut:

1. Perencanaan Publik

Perencanaan adalah bagaimana mengantisipasi masa depan menurut tujuan yang ditetapkan dengan melakukan persiapan yang didasarkan pada data informasi yang tersedia saat ini.

2. Penganggaran Publik

Anggaran menjabarkan rencana yang mendetail atas pendapatan dan pengeluaran organisasi agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, organisasi tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran. Bahkan tidak berlebihan walau wajar-wajar saja jika dikatakan pengelola/pengguna anggaran dan nmanajer publik secara bertahap dan sistematis.

3. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran publik merupakan pelaksanaan anggaran publik yang elah direncanakan dan ditetapkan dalam program serta kegiatan yang nyata. Ini

berarti fokus pelaksanaan anggaran tertuju pada operasionalisasi program atau kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan.

4. Pengadaan Barang dan Jasa Publik

Pengadaan barang dan jasa publik adalah proses, cara, dan tindakan dalam menyediakan barang serta jasa kepada masyarakat atau publik. Barang dan jasa yang disediakan merupakan bentuk pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

5. Pelaporan Keuangan Sektor Publik

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pembiayaan. Perlu diperhatikan bahwa ada beberapa komponen laporan seperti Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal, Laporan Arus Kas, dan dilengkapi oleh Catatan atas Laporan Keuangan.

6. Audit Sektor Publik

Mekanisme pemeriksaan adalah sebuah mekanisme yang dapat menggerakkan makna akuntabilitas di dalam pengelolaan sektor pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), instansi pengelola asset Negara lainnya. Pengujian atas laporan keuangan, laporan kinerja dan laporan lainnya oleh auditor independen bertujuan untuk mengekspresikan suatu opini yang jujur tentang posisi

keuangan, hasil operasi, kinerja, dan aliran kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi berterima umum.

7. Pertanggungjawaban Publik

Pertanggungjawaban publik adalah pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*) serta masyarakat yang memberikan amanah kepadanya, berdasarkan sistem pemerintah yang berlaku.

2.2 Hubungan Antar Variabel x dengan Y

2.2.1 Hubungan Antara Pendidikan dengan Pemahaman Akuntansi Sektor Publik

Tingkat pendidikan pejabat daerah adalah tingkatan pendidikan yang diperoleh secara formal oleh pejabat daerah yang dibuktikan dengan ijazah formal. Ijazah tersebut dapat digunakan untuk menunjukkan kemampuan seseorang. Batasan tingkat pendidikan pejabat daerah dapat diartikan jenjang pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh pejabat daerah. Dalam hal ini, jenjang pendidikan tinggi yang dimaksud adalah mencakup program atau tingkat diploma, sarjana, magister dan doktor. Tingkat diploma terbagi menjadi Diploma Satu (D1), D2, D3, dan D4. Tingkat sarjana, magister, dan doktor yang masing-masing sama artinya dengan Sarjana Strata Satu (S1), S2, dan S3. Menurut Fattah dalam Abdullah (2014: 62), Tingkat pendidikan menjadi indikator yang menunjukkan derajat intelektualitas seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pengetahuan dan tingkat intelektualitas seseorang. Dengan tingkat

pendidikan yang memadai, seseorang akan lebih mudah melaksanakan tugasnya dalam mengelola akuntansi sektor publik yang baik. Setiap SKPD harus mempunyai aparatur yang kompeten serta dilatar belakangi oleh tingkat pendidikan akuntansi dan keuangan yang memadai.

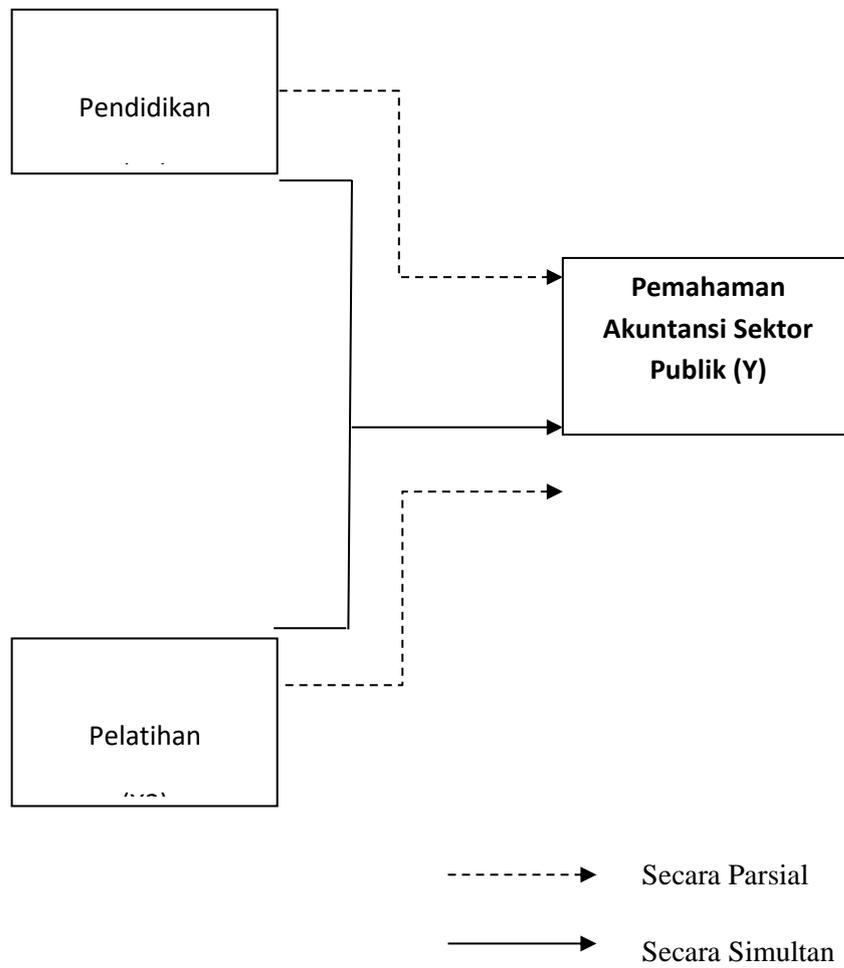
2.2.2 Hubungan Antara Pelatihan dengan Pemahaman Akuntansi Sektor Publik

Laporan keuangan pemerintah harus menyediakan informasi yang dapat dipakai oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintahan dalam membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik. Sumber daya manusia mempunyai pengaruh yang sangat penting, untuk meningkatkan kualitas agar mereka memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan tuntutan rakyat terkait dengan pemahaman akuntansi. Pelatihan dilakukan untuk memberikan atau meningkatkan kemampuan diri dalam mencapai tujuan organisasi. Menurut Simanjuntak dalam Abdullah (2014: 62) mendefinisikan pelatihan merupakan bagian dari investasi SDM untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja, sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai. Pelatihan dilakukan dengan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan jabatan, diberikan dalam waktu yang relatif pendek, dan membekali seseorang dengan keterampilan kerja. Lebih lanjut, Dessler dalam Abdullah (2014: 63) mengemukakan beberapa alasan mengapa pelatihan harus dilakukan atau menjadi bagian manajemen sumber daya manusia, diantaranya; pegawai belum memahami secara benar bagaimana melakukan pekerjaan, adanya perubahan lingkungan kerja dan tenaga kerja, meningkatnya daya saing dan penyesuaian terhadap peraturan-peraturan yang ada.

Pelatihan terkait dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk pekerjaan yang sekarang dilakukan. Pelatihan berorientasi ke masa sekarang dan membantu pegawai untuk menguasai keterampilan dan kemampuan (kompetensi) yang spesifik untuk berhasil dalam pekerjaannya.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran peneliti membahas mengenai variabel X1 (pendidikan) dan variabel X2 (pelatihan) dan Variabel Y (pemahaman akuntansi sektor publik) dalam penelitian ini yang masing-masing variabel memiliki indikator. Dari masing-masing indikator variabel tersebut maka peneliti akan memanfaatkan sebagai acuan membuat angket yang nantinya akan disebar kepada responden, kemudian setelah penyebaran dilakukan maka peneliti akan mencari uji validitas, uji reliabilitas, reliabilitas guna menentukan layak atau tidaknya angket tersebut diteliti, setelah diperoleh hasil maka peneliti menggunakan alat analisis yaitu analisis regresi linier berganda, uji hipotesis untuk menentukan seberapa jauh pengaruh satu variabel dengan variabel lainnya kemudian analisis koefisien determinasi. Berikut ini adalah gambaran kerangka pemikiran dapat lebih jelas dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Pikir

2.4 Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh Tilaar (2021) dengan judul penelitian yaitu Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan Terhadap Pemahaman Akuntansi Sektor Publik Di Keuangan Rumah Sakit Abdul Moloek Provinsi Lampung. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan alat analisis uji kualitas data berupa uji validitas dan reliabilitas serta uji hipotesis berupa Uji Parsial (t), Uji Simultan (F), Uji Koefisien Determinasi (R^2), Uji Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan berpengaruh secara parsial Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi Sektor Publik di Rumah Sakit Abdul Moloek Provinsi Lampung, Pelatihan berpengaruh secara parsial terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi Sektor Publik di Rumah Sakit Abdul Moloek Provinsi Lampung, Pendidikan dan Pelatihan secara bersama-sama berpengaruh secara simultan Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi Sektor Publik.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh [Elsa](#). 2013. dengan judul penelitian yaitu Analisis Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi Sektor Publik (Studi kasus pada pegawai yang bekerja pada Bagian Keuangan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Pemprov Jatim). Teknik analisis yang dipergunakan adalah analisis Regresi Linier Berganda. Hasil analisis kemudian di analisis dengan uji asumsi klasik serta uji F. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat pemahaman akuntansi sektor publik para responden. Variabel pelatihan berpengaruh lebih dominan terhadap tingkat pemahaman akuntansi sektor publik dibandingkan pendidikan. Dapat dilihat dari nilai R^2 parsial

pada variabel pendidikan sebesar 5,19%, sedangkan nilai R^2 parsial pada variabel pelatihan sebesar 22,37%.

Selanjutnya penelitian ketiga yang dilakukan oleh Antika. 2015. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa secara parsial membuktikan bahwa Pemahaman Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan, Pemanfaatan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan, Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan, Efektivitas Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan. Secara simultan dapat diketahui Pemahaman Akuntansi, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan. Berdasarkan nilai Adjusted R^2 dari hasil analisis dengan SPSS 22 sebesar 0,926. Dengan demikian besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 92,6 %, sedangkan sisanya sebesar 7,4 % adalah dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

2.5 Hipotesis Penelitian

Menurut para ahli Arikunto (2017: 110), “hipotesis didefinisikan sebagai sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data terkumpul”. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: diduga ada pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap pemahaman akuntansi sektor publik pada pegawai yang bekerja pada Kantor Inspektorat Baturaja baik secara parsial maupun simultan.